

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

ZAILI RUSLI

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
e-mail: zailirusli@ymail.com

Abstract: Empowerment of the Poor Urban. This study aims to see the implementation of empowerment programs for the poor through a program of Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpang Pinjam (UEK-SP) in the Pekanbaru City. The study focused on studies in the area of community empowerment that can be found in the thorough investigation of community empowerment. The results show the poor through the empowerment program UEK-SP program in the Pekanbaru City although still has many obstacles, but its implementation was able to walk in accordance with the provisions and regulations.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpang Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru. Penelitian difokuskan kepada kajian di kawasan pemberdayaan masyarakat supaya dapat ditemukan hasil menyeluruh dalam melakukan penyelidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP di Kota Pekanbaru walaupun masih mengalami banyak kendala, namun implementasinya sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengarah kepada pemberian otonomi untuk setiap daerah dalam usaha membangun daerah dengan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Tujuan dari otonomi yang diberikan agar daerah memiliki keleluasaan (*disrectionary power*) untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Dalam konsep itu terkandung makna bahwa terjadinya perubahan kehidupan bermasyarakat apabila daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerahnya dengan prinsip-prinsip yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perubahan kehidupan masyarakat diarahkan kepada kemandirian daerah dalam pemberdayaan masyarakat.

Refleksi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melihat masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat daerah. Masalah sosial masyarakat saat ini sangat

beraneka ragam, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya latar belakang pendidikan, budaya tempatan, mata pencaharian dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat setempat. Beranjak dari kondisi yang beragam tersebut dalam suatu masyarakat akan menimbulkan jenis penanganan yang berbeda ketika seseorang atau kelompok ingin melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelebihan yang ada di suatu wilayah objek pelaksanaan program.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun, baik perorangan ataupun melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pelaksanaan program tersebut biasanya disesuaikan dengan wilayah yang akan dijadikan objek pelaksanaan, tentunya dengan melihat perkembangan masyarakat selama ini. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas pemberdayaan masyarakat pada masyarakat pedesaan yang *notabene* dianggap belum tersentuh secara maksimal oleh informasi tetapi juga terhadap masyarakat kota

dan pinggiran kota, dimana keberadaan masyarakatnya sangat majemuk dan juga arus informasi serta dampak dari arus urbanisasi di dua wilayah tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang dijadikan subyek dan tidak boleh disamakan dengan daerah pedesaan.

Selain itu juga memberdayakan masyarakat di dalam pembangunan daerah merupakan usaha untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka masing-masing. Sehingga tidak muncul keinginan pembangunan yang datang hanya dari pihak penguasa saja, tetapi alangkah lebih baik muncul dari pihak yang diberdayakan. Karena masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik dengan kemampuan yang dimiliki, serta mengurangi jurang kesenjangan di dalam masyarakat yang sudah tercipta, serta mengatasi permasalahan kemiskinan yang sudah menghantui kehidupan masyarakat selama ini.

Kata pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat (Usman, 2004). Pemberdayaan lebih bersifat kontekstual sosiologis, artinya bagaimana manusia dapat mempertahankan hidup (survival), tidak hanya dari segi fisik seperti pada masa awal perkembangan manusia, tetapi lebih dari itu pemberdayaan menyangkut keterlibatan, akses dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam hal, seperti pengetahuan (ilmu), ekonomi, politik, hukum dan berbagai segi kehidupan manusia (Nugroho, 2003).

Wilson dalam Sumaryadi (2004) membuat penilaian suatu organisasi berdasarkan sejumlah indikator yang memberikan sumbangan terhadap atau diakibatkan oleh pemberdayaan. Indikator-indikator tersebut menghubungkan kita dengan organisasi. Indikator-indikator tersebut adalah: a) *Reputasi*, berhubungan dengan derajat

penilai organisasi oleh pemegang saham, masyarakat, pesaing, manajer, pengusaha dan masyarakat yang diinformasikan untuk memberdayakan semua stafnya; b) *Fokus manajemen*, mengacu pada cara manajemen senior menilai, mendorong, mendukung, dan mempraktekkan pemberdayaan; c) *Manajemen pemberdayaan*, mengacu kepada pemahaman dan pengelolaan pemberdayaan oleh para pemimpin/birokrat, d) *Atmosfir*, suasana bila memasuki suatu organisasi sering kita menjumpai atmosfir/suasana kelesuan, infleksibilitas, dan standar yang minim.

Selanjutnya adalah: e) *Kepemimpinan*, tingkat gaya kepemimpinan dari para manajer/birokrat dalam memprakarsai, mendorong, dan mendukung pemberdayaan; f) *Kepercayaan*, keterbukaan dalam organisasi yang memungkinkan orang menjadi terperdaya dan mengambil resiko; g) *Teamwork*, tingkat pemanfaatan kemampuan/talenta dan tim yang berbeda (*empowered teams*); h) *Pengambilan dan pengendalian keputusan*, dimungkinkan dari tingkat yang paling rendah dalam organisasi; i) *Komunikasi*, tingkat komunikasi yang terbuka dan teratur dalam organisasi; j) *Kepuasan Masyarakat*, derajat inisiatif pemberdayaan diarahkan kepada kepuasan masyarakat, secara internal atau eksternal kepada organisasi; k) *Struktur dan Prosedur*, organisasi melakukan perubahan-perubahan dalam struktur dan prosedurnya guna mendukung pemberdayaan; dan l) *Tujuan Organisasi*, tingkat inisiatif pemberdayaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Upaya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tidak terlepas dari permasalahan atau faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Lowe dalam Nugroho (2003), yaitu: a) *Ketakutan (fear)*. Banyak individu yang begitu sederhana takut akan pemberdayaan, hal ini dikarenakan mereka tidak akan dapat dukungan yang dijanjikan apabila mereka melakukan kesalahan; b) *Role clarity*. Untuk masyarakat, ketidaknyamanan pekerjaan baru berasal dari kebingungan atau kurang senang dengan peran baru atau pekerjaan baru

mereka setelah diberdayakan; c) *Resistance to change*. Hal ini mengarah kepada kecenderungan oleh pihak pemberdaya (pemerintah, swasta atau pihak lainnya) untuk berpegang teguh kepada cara-cara yang sudah mapan dalam mengerjakan dan pengenalan proses pemberdayaan.

METODE

Kajian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat supaya dapat ditemukan hasil menyeluruh dalam melakukan penyelidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini kerana kawasan pemberdayaan masyarakat yang dipilih sebagai kajian yang telah dikukuhkan dan terpelihara berdasarkan pengamatan awal. Kawasan kajian yang dipilih boleh menghasilkan suatu penemuan yang lebih relevan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan *teknik snowball sampling* yaitu menemukan informan kunci untuk mengetahui informan lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan penyelidikan mendalam. Wawancara adalah teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam, dalam upaya pemahaman secara komprehensif, dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang ditujukan secara lisan terhadap responden, yang berisikan sejumlah pertanyaan pokok yang telah dipersiapkan, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara, karena pertanyaan telah terstruktur sehingga mendapat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan penyelidikan mendalam adalah teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh data primer, mengenai fakta, aktivitas, perilaku dan interpretasi responden dengan cara menyusun suatu daftar pernyataan, secara tertulis dalam bentuk tertutup, terbuka, yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk mendapatkan jawaban dan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator-indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Reputasi

Reputasi merupakan penilaian yang diberikan oleh pihak eksternal terhadap organisasi yang melaksanakan program pemerksaan masyarakat miskin. Sehingga dengan memiliki reputasi yang baik akan memberikan nilai tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan. Reputasi yang dimiliki oleh pengelola program UEK-SP di Kota Pekanbaru sudah baik. Artinya pelaksana program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pinjaman dengan baik. Kemudian pihak pengelola juga berhasil mengembalikan penguliran dana yang telah diberikan kepada masyarakat miskin dengan tingkat pengembalian $\pm 85\%$. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelola mampu memberikan tekanan kepada masyarakat miskin yang melakukan peminjaman untuk dapat dengan segera mengembalikaj pinjaman sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab apabila proses pengembalian tidak dilakukan dengan tepat waktu, maka pengelola akan memberikan sanksi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pula. Namun sebaliknya apabila masyarakat mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan sesuai ketentuan, maka akan diikutsertakan dalam program undian akhir tahun sebagai bentuk *reward* yang diberikan kepada masyarakat.

Fokus manajemen

Fokus manajemen merupakan cara memberikan dorongan dan mempraktekkan pemberdayaan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya dorongan yang diberikan diharapkan program pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin sudah dilakukan perencanaan pelaksanaan yang matang

terutama mengenai sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Proses pengorganisasian juga sudah berjalan dengan lancar, karena dalam keanggotaan pengelola program UEK-SP sudah dibagi *job description* yang jelas untuk masing-masing pengelola. Sehingga dengan adanya *job description* tersebut, pengelola bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun pelaksanaan fokus manajemen juga tidak luput dari hambatan dan halangan salah satunya adalah SDM dan modal pelaksanaan program yang masih kecil. Kondisi ini membuat pengelola sulit untuk bisa menyalurkan program kepada seluruh sasaran yang sudah terdata dan diverifikasi. Akibatnya dibutuhkan waktu untuk bisa menggulirkan program pemberdayaan masyarakat miskin kepada seluruh sasaran yang telah terdata dan ditetapkan.

Manajemen pemberdayaan

Manajemen pemberdayaan merupakan tingkat pemahaman pengelola program Pemberdayaan masyarakat miskin dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya pemahaman yang baik dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat miskin akan dapat melakukan pembasmian kemiskinan. Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pengelola program sudah baik, walaupun tidak keseluruhannya memiliki tingkat pemahaman yang sama. Fakta ini disebabkan oleh setiap pengelola memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga membentuk pola pikir dan pemahaman yang juga berbeda-beda. Kondisi ini terkadang yang sering menyebabkan perdebatan yang panjang diantara para pengelola program apabila akan melakukan pengambilan keputusan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan. Namun ketidakselarasan yang dialami biasanya dapat dipecahkan melalui musyawarah dan mufakat diantara pengelola program UEK-SP. Sehingga faktor ketidakselarasan tersebut, bukan menjadi penghalang utama dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pengelola program UEK-SP.

Atmosfir

Atmosfir merupakan suasana atau iklim kerja yang dikembangkan dalam organisasi pengelola program Pemberdayaan masyarakat miskin. Sebab dengan adanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif akan sangat mendukung semangat dan kegairahan kerja pengelola program. Iklim atau suasana kerja yang kondusif sebanarnya sudah terwujud. Artinya telah tercipta suasana kerja yang menyenangkan didalam organisasi pengelola UEK-SP. Sehingga implementasi program Pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan lancar. Walaupun kantor pengelola UEK-SP tidak buka dalam setiap harinya, tetapi apabila setiap pengelola melakukan pertemuan tercipta suasana yang menyenangkan dan keakraban diantara sesama pengelola program. Namun sebaliknya atmosfir yang sifatnya eksternal terutama kepada masyarakat, masih belum berjalan dengan kondusif. Faktanya tidak semua masyarakat memiliki kepedulian akan pelaksanaan program UEK-SP, karena mereka lebih sibuk mengurus kegiatan mereka masing-masing. Sehingga yang memiliki kepedulian akan program UEK-SP adalah masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung akan program tersebut. Suasana inilah yang menyebabkan program UEK-SP tidak diketahui secara jelas oleh keseluruhan masyarakat, yang akhirnya memunculkan persepsi bahwa program UEK-SP hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja.

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah tingkat kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh ketua pengelola program Pemberdayaan masyarakat miskin dalam melaksanakan programnya. Karena dengan adanya kepemimpinan yang baik, akan memperlancar pelaksanaan kegiatan dan aktivitas di dalam organisasi. Penerapan kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua pengelola program UEK-SP sudah baik. Artinya dalam pelaksanaan kepemimpinan hampir keseluruhan lembaga pengelola UEK-SP memberikan tanggapan baik. Dimana seorang pimpinan mampu mengayomi, mengarahkan dan mengambil

keputusan berdasarkan musyawarah dengan setiap anggotanya. Sehingga mengurangi timbulnya perselisihan diantara sesama pengelola program UEK-SP. Walaupun faktanya ini tidak terjadi diseluruh organisasi pengelola UEK-SP, tetapi mayoritas organisasi dapat menunjukan sistem kepemimpinan yang diterima oleh setiap anggotanya. Perwujudan ini terlihat dengan adanya kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi terhadap setiap anggotanya didalam organisasi pengelola UEK-SP.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan tingkat keterbukaan antara sesama anggota organisasi pengelola dan masyarakat. Sehingga dengan adanya kepercayaan ini akan menghapus kecurigaan diantara anggota dalam mengimplementasikan program UEK-SP. Tingkat kepercayaan dan keterbukaan pengelola program pemberdayaan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik. Artinya pihak pengelola program UEK-SP sudah sangat transparan terhadap informasi tentang pelaksanaan program UEK-SP, sehingga siapa saja masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan program UEK-SP dapat memperoleh program tersebut. Fakta ini memang dikedepankan oleh seluruh pengelola UEK-SP yang ada, agar program yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dapat terealisasi tepat sasaran.

Namun informasi yang penulis terima dari masyarakat bahwa bentuk ketidakpercayaan muncul dari informasi kriteria yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin. Salah satunya adalah kriteria yang menjelaskan tentang masyarakat miskin yang boleh menerima program UEK-SP adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha. kriteria inilah yang membuat masyarakat miskin pada umumnya kesulitan mengikuti program UEK-SP yang diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh karenanya revisi kriteria perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru supaya penerima program UEK-SP benar-benar masyarakat miskin yang akan diperkasakan.

Teamwork

Teamwork merupakan tingkat pemanfaatan kemampuan/talenta dan tim yang berbeda (*empowered teams*). Sehingga dengan adanya kerjasama sebagai sebuah tim kerja dalam mengelola program UEK-SP, diharapkan program Pemberdayaan masyarakat miskin dapat tepat sasaran dan mampu membasmi kemiskinan. Kerjasama yang dikembangkan antara sesama pengelola program UEK-SP sudah dapat berjalan dengan lancar. Artinya setiap pengelola dapat melakukan komunikasi yang baik, guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program UEK-SP yang sudah dikerjakan bersama-sama. Karena dengan adanya tim kerja yang saling mendukung setiap pekerjaan yang dibebankan kepada pengelola akan berjalan dengan baik. Kekompakkan tim kerja sangat diperlukan dalam pembuatan keputusan hasil pendataan dan verifikasi terhadap bakal calon penerima program UEK-SP. Sebab dalam pengambilan keputusan dibutuhkan suara dan persepsi yang sama terhadap bakal calon penerima program UEK-SP. Maka dari itu kerjasama tim kerja sangat dibutuhkan dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP.

Pengambilan dan pengendalian keputusan

Pengambilan dan pengendalian keputusan merupakan proses penampungan aspirasi yang dilakukan pimpinan dalam upaya mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasinya. Proses penampungan aspirasi bisa dilakukan mulai dari lingkungan internalnya ataupun eksternalnya. Sebab masukkan yang diberikan dari kedua lingkungan tersebut akan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan atau ketua ada yang diputuskan berdasarkan persepsi bawahan dan ada juga yang diputuskan berdasarkan pertimbangan pribadi pimpinan saja. Fakta ini membuktikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan atau ketua dalam pelaksanaan program UEK-SP masih adanya yang

bersifat pribadi, yang terkadang keputusan tersebut tidak menyenangkan semua pihak.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian berita atau pesan dari satu orang kepada orang yang lainnya. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, himbuan, penyuluhan dan sebagainya. Komunikasi merupakan langkah awal yang penting dalam mengimplementasikan program Pemberdayaan masyarakat miskin. Sebab tanpa ada komunikasi yang baik, informasi program yang akan dilakukan tentunya sulit diterima oleh masyarakat sebagai sasaran program. Sehingga komunikasi dapat dijadikan kunci penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin. Kerena melalui komunikasi masyarakat akan memperoleh sosialisasi, informasi dan kejelasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk itu pengelola program UEK-SP harus bisa melakukan komunikasi yang baik dan benar dalam pelaksanaan program UEK-SP, agar program tersebut dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

Kepuasan masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pengelola program pemberdayaan masyarakat miskin. Karena kepuasan pelayanan masyarakat akan segera diwujudkan, supaya masyarakat bisa menikmati pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dengan baik. Masyarakat sudah memiliki tingkat kepuasan yang cukup baik. Sehingga pelaksanaan program UEK-SP yang dilakukan mulai tahap pengusulan proposal pinjaman, tahap pencairan dan tahap pengembalian dapat dilayani dengan baik. Karena dengan adanya pelayanan yang baik akan membuat masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan pengurusan program UEK-SP. Oleh karenanya pengelola program UEK-SP harus berusaha dengan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik.

Struktur dan prosedur

Struktur dan prosedur merupakan proses perubahan bentuk struktur dan prosedur dalam melaksanakan program Pemberdayaan masyarakat miskin. Upaya melakukan perubahan terjadi apabila sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal dan optimal. Sebab ada beberapa unit kerjanya tidak mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Selain itu perubahan dalam organisasi juga dilakukan akibat adanya prosedur-prosedur dalam organisasi yang tidak berjalan, padahal prosedur tersebut merupakan langkah menuju pelaksanaan tugas organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan struktur kerja yang dilakukan oleh pengelola program UEK-SP sudah berjalan dengan baik. Artinya setiap unit kerja yang terdapat didalam struktur tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebab setiap unit kerja sudah dibagi dengan jelas apa tugas dan fungsinya dalam melaksanakan roda organisasi. Sedangkan prosedur yang ditetapkan terhadap calon penerima program disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Organisasi pelaksana hanya tinggal melaksanakannya di lapangan saja. Namun hambatan yang sering menjadi keluhan bagi masyarakat calon penerima dalam mengikuti prosedur penerimaan program, adalah tentang persyaratan penerima program yang cukup rumit dan sulit untuk dipenuhi. Salah satu persyaratan ini adalah setiap masyarakat miskin yang ingin diperkasakan harus memiliki usaha yang bisa dikembangkan. Persyaratan ini menjadi momok yang menakutkan bagi setiap calon penerima program. Bukan saja menakutkan, tetapi bisa membuat calon penerima enggan mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan tingkat inisiatif yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam merealisasikan tujuan pemberdayaan yang dilakukan organisasi. Apabila inisiatif dan inovasi

yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin, maka diharapkan program ini dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Upaya merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan menjadi sangat penting dan sakral bagi seluruh pengelola program UEK-SP. Karena dengan adanya kemampuan merealisasikan tujuan organisasi, maka akan menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program UEK-SP. Sebab sasaran yang ingin dicapai dalam perwujudan tujuan organisasi adalah membasmi kemiskinan yang sampai saat ini menjadi virus yang mematikan di Negara kita. Oleh sebab itu menetapkan strategi yang jitu dalam merealisasikan tujuan organisasi merupakan langkah yang bijak untuk memenuhi ambisi tersebut.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru cukup baik. Artinya setiap proses kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP ini tidak luput dari kritikan, tetapi pelaksanaan program harus tetap terus berjalan dalam upaya membasmi kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, sumbangsih saran dan masukan dari setiap akademisi dan peneliti terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP akan sangat membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi atau membasmi kemiskinan yang ada.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Ketakutan (fear)

Ketakutan (*fear*) merupakan perasaan bersalah yang dimiliki oleh penerima program pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu suatu perasaan yang muncul dalam diri masyarakat akan kegagalan apabila mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin yang diberikan. Perasaan inilah yang terkadang lebih besar

mendorong masyarakat untuk tidak mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat miskin memiliki rasa takut yang cukup tinggi, terutama takut akan kegagalan apabila sudah mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah. Rasa takut yang berlebihan membuat masyarakat miskin kurang peduli program pemberdayaan yang sudah dibuat dan disusun. Fakta inilah yang membuat di awal-awal penguliran program UEK-SP menjadi momok bagi masyarakat miskin. Apalagi dengan adanya persyaratan yang rumit seperti harus memiliki usaha, semakin membuat masyarakat larut akan ketakutannya. Karena masyarakat miskin mana yang memiliki usaha, kecuali masyarakat miskin yang mata pencahariannya sebagai pedagang. Kondisi inilah yang menjadi faktor penyebab program pemberdayaan masyarakat miskin diberikan dengan tidak tepat sasaran. Dimana yang menerima program bukan keseluruhannya berasal dari keluarga miskin melainkan sebaliknya.

Ketidakwajaran (role of clarity)

Ketidakwajaran (*role of clarity*) merupakan rasa ketidaknyamanan yang dimiliki oleh masyarakat apabila mengikuti program atau merubah pekerjaan yang sudah digelutinya bertahun-tahun. Rasa ketidakwajaran ini disebabkan adanya keinginan pihak pemeriksa untuk memaksa pekerjaan baru kepada masyarakat miskin yang mengikuti pelaksanaan program. Masyarakat miskin memiliki rasa tidak nyaman apabila dilakukan pemberdayaan dengan merubah pekerjaan yang dimilikinya. Artinya masyarakat miskin tidak menginginkan pemberdayaan melakukan perubahan akan pola pekerjaan yang mereka telah geluti bertahun-tahun. Oleh karena itu, proses pemberdayaan tidak luput dari adanya identifikasi akan pekerjaan atau kegiatan yang selama ini digeluti oleh calon masyarakat yang akan diperkasakan. Sehingga keinginan pemberdayaan yang akan dilakukan adalah pekerjaannya masyarakat. Sebab menjalani suatu pekerjaan yang baru memang membutuhkan pemahaman, kesabaran dan ketenangan dari dalam diri masyarakat tersebut.

Kecenderungan menggunakan cara yang sudah ada (resistance to change)

Kecenderungan menggunakan cara yang sudah ada (*resistance to change*) merupakan proses penyelarasan atau penggunaan program yang sama didalam objek yang berbeda. Sebab pemikiran pihak pemeriksa melaksanakan program yang dahulunya berhasil dilaksanakan akan lebih mudah dibandingkan dengan memulai ide baru dalam untuk membuat kegiatan yang baru. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin memang berjalan berdasarkan ketentuan kegiatan yang telah ditetapkan. Karena memang kegiatan program UEK-SP memang fokus kepada perbantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha dirumahnya atau dengan kelompoknya. Artinya pemerintah berusaha mengarahkan masyarakat miskin untuk bisa menjadi wirausaha yang kondisinya belum tentu nyaman bagi masyarakat miskin yang akan diperkasakan. Oleh karenanya pemberdayaan butuh pengenalan potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin, sehingga dengan adanya penelusuran potensi tersebut diharapkan masyarakat miskin bisa perkasakan berdasarkan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat miskin adalah faktor ketidakwajaran atau ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh mas-

yarakat miskin merasa tidak nyaman apabila harus memulai suatu pekerjaan yang baru. Proses pemahaman akan pekerjaan yang baru butuh waktu yang cukup, jadi tidak bisa dipaksakan atau diinstankan. Fakta inilah yang membuat masyarakat miskin enggan menerima program UEK-SP yang diberikan oleh pemerintah, karena harus merubah kebiasaan bekerja yang mereka lakukan.

SIMPULAN

Setiap proses kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan program ini tidak luput dari kritikan, tetapi pelaksana program harus tetap terus berjalan dalam upaya membasmi kemiskinan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat miskin adalah faktor ketidakwajaran atau ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin merasa tidak nyaman apabila harus memulai suatu pekerjaan yang baru. Proses pemahaman akan pekerjaan yang baru butuh waktu yang cukup, jadi tidak bisa dipaksakan atau diinstankan. Fakta inilah yang membuat masyarakat miskin enggan menerima program UEK-SP yang diberikan oleh pemerintah, karena harus merubah kebiasaan bekerja yang mereka lakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, Nashir, 2001, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1995, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sumaryadi, Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama., Jakarta.

Usman, Sunyoto, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.